

**LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN BA.018
TAHUN ANGGARAN 2016**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2016



CERTIFICATE NO 09/QM/170



Jl. Tentara Pelajar (Cimanggu) No. 1 Bogor 16111
Tlp. (0251) 8313083 Fax. (0251) 8336194
Website : <http://www.perkebunan.litbang.deptan.go.id>
Email : crieo@indo.net.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Bogor, 07 Januari 2017
Kepala Pusat,

Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si
NIP. 196903141994031001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Telah Direviu

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I Laporan Realisasi Anggaran

II Neraca

III Laporan Operasional

IV Laporan Perubahan Ekuitas

V Catatan atas Laporan Keuangan

A Penjelasan Umum

B Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1 Pendapatan

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2 Belanja

B.2.1 Belanja Pegawai

B.2.2 Belanja Barang

B.2.3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.2.4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.2.5 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

B.2.6 Belanja Modal Lainnya

C Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1 Aset Lancar

C.1.1 Persediaan

C.2 Aset Tetap

C.2.1 Peralatan dan Mesin

C.2.2 Gedung dan Bangunan

C.2.3 Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.4 Aset Tetap Lainnya

C.2.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3 Aset Lainnya

C.3.1 Aset Lain-lain

C.3.2 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

- C.4 Kewajiban Jangka Pendek
 - C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga
- C.5 Ekuitas
 - C.5.1 Ekuitas
- D Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
 - D.2 Beban Pegawai
 - D.3 Beban Persediaan
 - D.4 Beban Barang dan Jasa
 - D.5 Beban Pemeliharaan
 - D.6 Beban Perjalanan Dinas
 - D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi
 - D.8 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1 Ekuitas Awal
 - E.2 Surplus/Defisit-LO
 - E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.4.1 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
 - E.5 Transaksi Antar Entitas
 - E.6 Ekuitas Akhir
- F Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2 Pengungkapan Lain-lain



KEMENTERIAN PERTANIAN

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN**

Jl. Tentara Pelajar (Cimanggu) No. 1, Bogor 16111 TELEPON. (0251) 8313083, 8384105, Faksimile : (0251) 8336194
E-mail : criec@indo.net.id; puslitbangbun@litbang.deptan.go.id WEBSITE : <http://www.perkebunan.litbang.deptan.go.id>



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bogor, 07 Januari 2017
Kepala Pusat,

Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si
NIP. 196903141994031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN Tahun 2016 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp52.040.389,00 atau mencapai 268,25% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp19.400.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2016 adalah sebesar Rp26.336.534.834,00 atau mencapai 92,59% dari alokasi anggaran sebesar Rp28.444.688.000,00

II Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2016.

Nilai Aset per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp35.100.917.032,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp3.231.500,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp35.093.587.963,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp4.097.569,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp41.175.810,00 dan Rp35.059.741.222,00.

III Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp14.837.789,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp24.071.828.256,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-24.056.990.467,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp34.260.100,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-24.022.730.367,00.

IV Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2016 adalah sebesar Rp33.027.836.193,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-24.022.730.367,00

kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp1.420.854.193,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp24.633.771.203,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah senilai Rp35.059.741.222,00.

V Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2016 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2016 dan 31 DESEMBER 2015**

Uraian	Catatan	31 Desember 2016			31 Desember 2015
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	19.400.000,00	52.040.389,00	268,25	79.021.918,00
Jumlah Pendapatan		19.400.000,00	52.040.389,00	268,25	79.021.918,00
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.2.1	5.942.380.000,00	5.902.751.862,00	99,33	6.047.402.383,00
Belanja Barang	B.2.2	16.374.323.000,00	15.077.892.680,00	92,08	17.613.072.403,00
Jumlah Belanja Operasi		22.316.703.000,00	20.980.644.542,00	94,01	23.660.474.786,00
Belanja Modal					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	B.2.3	1.052.985.000,00	1.044.423.292,00	99,19	1.370.062.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	B.2.4	5.075.000.000,00	4.311.467.000,00	84,96	6.972.677.555,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	B.2.5	0,00	0,00	0,00	816.677.558,00
Belanja Modal Lainnya	B.2.6	0,00	0,00	0,00	24.800.000,00
Jumlah Belanja Modal		6.127.985.000,00	5.355.890.292,00	87,40	9.184.217.113,00
Jumlah Belanja		28.444.688.000,00	26.336.534.834,00	92,59	32.844.691.899,00

Bogor, 07 Januari 2017
Kepala Pusat,

Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si
NIP. 196903141994031001

II. NERACA

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 dan 31 DESEMBER 2015**

Uraian	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1	3.231.500,00	3.625.850,00
Jumlah Aset Lancar		3.231.500,00	3.625.850,00
Aset Tetap			
Peralatan dan Mesin	C.2.1	20.826.134.477,00	20.157.272.475,00
Gedung dan Bangunan	C.2.2	33.442.497.799,00	29.708.583.764,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.3	830.735.408,00	1.572.861.408,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.4	88.463.941,00	88.463.941,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.5	-15.900.265.949,00	-13.910.897.597,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.2.5	-3.665.437.503,00	-4.039.944.490,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.5	-528.540.210,00	-510.938.556,00
Jumlah Aset Tetap		35.093.587.963,00	33.065.400.945,00
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.3.1	374.546.692,00	524.871.022,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	C.3.2	-370.449.123,00	-517.633.056,00
Jumlah Aset Lainnya		4.097.569,00	7.237.966,00
Jumlah Aset		35.100.917.032,00	33.076.264.761,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	41.175.810,00	48.428.568,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		41.175.810,00	48.428.568,00
Jumlah Kewajiban		41.175.810,00	48.428.568,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.1	35.059.741.222,00	33.027.836.193,00
Jumlah Ekuitas		35.059.741.222,00	33.027.836.193,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		35.100.917.032,00	33.076.264.761,00

Bogor, 07 Januari 2017
Kepala Pusat,

Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si
NIP. 196903141994031001

III. LAPORAN OPERASIONAL

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 dan 31 DESEMBER 2015**

Uraian	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	14.837.789,00	29.835.863,00
JUMLAH PENDAPATAN		14.837.789,00	29.835.863,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	5.902.751.862,00	6.047.402.383,00
Beban Persediaan	D.3	4.911.377.907,00	6.546.838.705,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	4.875.804.998,00	5.858.877.367,00
Beban Pemeliharaan	D.5	272.851.844,00	145.715.844,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	5.011.009.523,00	5.062.357.196,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	3.098.032.122,00	3.261.582.536,00
JUMLAH BEBAN		24.071.828.256,00	26.922.774.031,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-24.056.990.467,00	-26.892.938.168,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	27.600.000,00	28.600.000,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	2.942.500,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	9.602.600,00	20.586.055,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		34.260.100,00	49.186.055,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-24.022.730.367,00	-26.843.752.113,00

Bogor, 07 Januari 2017
Kepala Pusat,

Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si
NIP. 196903141994031001

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 dan 31 DESEMBER 2015**

Uraian	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
EKUITAS AWAL	E.1	33.027.836.193,00	28.813.788.133,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	-24.022.730.367,00	-26.843.752.113,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0,00	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4		
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.1	1.420.854.193,00	9.856.270,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	24.633.771.203,00	31.047.943.903,00
EKUITAS AKHIR		35.059.741.222,00	33.027.836.193,00

Bogor, 07 Januari 2017

Kepala Pusat,

Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si

NIP. 196903141994031001

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan

Puslitbang Perkebunan merupakan salah satu Unit Kerja Eselon II di lingkungan Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian. Puslitbang Perkebunan dibentuk Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 610/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, dengan tugas utama melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, penelitian dan pengembangan perkebunan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Sejalan dengan kebijakan strategis pembangunan perkebunan, Puslitbang Perkebunan difokuskan untuk melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis. Rencana dan program serta pemantauan dan evaluasi penelitian dan pengembangan perkebunan;
2. Pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan perkebunan;
3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan perkebunan;
4. Pengelolaan urusan tata usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Puslitbang Perkebunan didukung oleh Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat, Balai Penelitian Tanaman Palma dan Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar dengan sumber daya sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia terdiri dari 720 orang Pegawai Negeri Sipil yang tersebar di lima unit kerja atau UPT sebagai berikut :
 - Puslitbang Perkebunan sebanyak 79 pegawai
 - Balitro sebanyak 264 pegawai
 - Balittas sebanyak 176 pegawai
 - Balit Palma sebanyak 101 pegawai
 - Balittri sebanyak 100 pegawai
2. Sarana komunikasi yang dilaksanakan dan yang diterbitkan lingkup Puslitbang Perkebunan adalah Jurnal Littri, Perspektif, Buletin Tro, Perkembangan Littro, Buletin Palma (yang sudah terakreditasi) serta Buletin Ristri, Warta Litbang dan Infotek Perkebunan (belum terakreditasi)
3. Kebun Percobaan seluas 837,7 ha, terdiri dari 18 kebun (15 kebun sudah bersertifikat, 2 kebun Pinjam Pakai dan 1 kebun belum bersertifikat lengkap)
4. Laboratorium dan Rumah Kaca
Puslitbang Perkebunan memiliki asset berupa Laboratorium dan Rumah kaca yang berdasarkan UPT nya adalah sebagai berikut:
 - Balitro mengelola : Lab pelayanan/Pengujian Kimia (terakreditasi), Lab Fisiologi, Pemuliaan, Hama dan Penyakit
 - Balittas mengelola : Lab Benih, Kultur Jaringan, Pemuliaan, Entomologi/ Fitopathologi, Uji Mutu Hasil dan Tanaman
 - Balit Palma mengelola : Lab Teknologi Hasil, Bioteknologi, Pemuliaan, Hama dan penyakit, dan Ekofisiologi
 - Balittri mengelola : Lab Hama, Penyakit, dan Ekofisiologi
5. Anggaran penelitian Puslitbang Perkebunan berasal dari APBN dan Kerja sama.

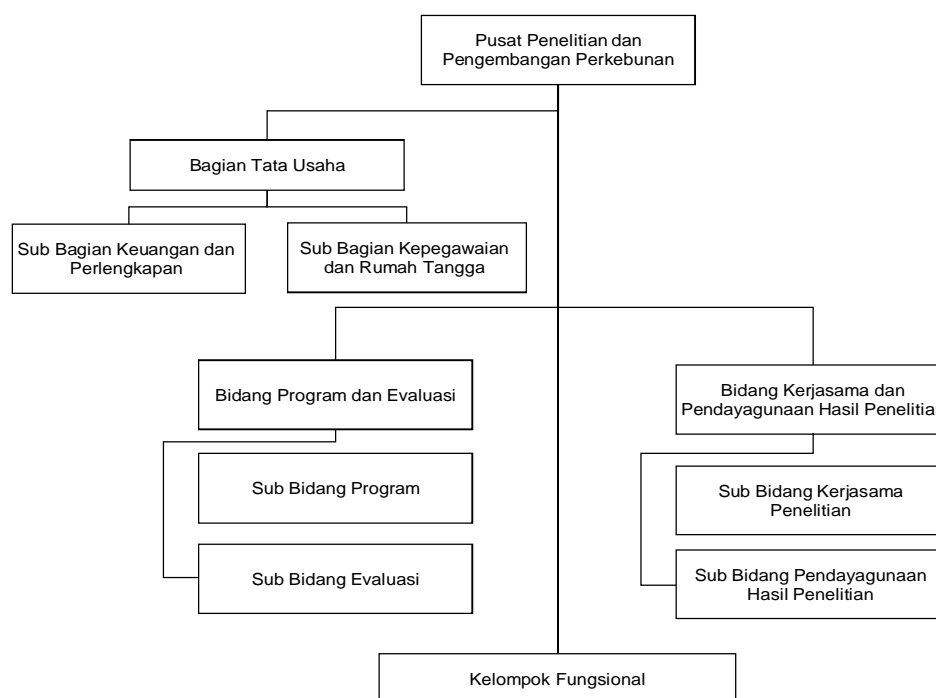
Puslitbang Perkebunan memandang perlu menerapkan ISO 9001 2008 sebagai pedoman dalam rangka pematangan kelembagaan dan manajemen penelitian dan pengembangan perkebunan, sehingga mampu memberikan dukungan dan kontribusi positif untuk menciptakan kinerja yang lebih baik. terutama dalam mencapai pengembangan kelembagaan dan manajemen Puslitbangbun yang bermuara pada tercapainya kesejahteraan masyarakat terutama yang berkaitan dengan bidang perkebunan.

Efektivitas dan efisiensi kegiatan Puslitbang Perkebunan tidak terlepas dari dukungan kelembagaan dan sistem manajemen yang handal. Perkembangan manajemen modern terus dikaji, dikembangkan dan disesuaikan dengan tuntutan dinamika pembangunan perkebunan yang sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan strategis baik global maupun dalam negeri. Oleh karena itu, Puslitbang Perkebunan harus menetapkan visi dan misi yang futuristik dan partisipatif agar mampu menghadapi perubahan lingkungan strategis yang dinamis dan berorientasi kepada kebutuhan pengguna. Untuk menjawab tantangan di atas perlu dilakukan reorientasi sistem manajemen internal kelembagaan penelitian dan pengembangan pertanian.

Dalam kerangka operasionalisasinya, Puslitbang Perkebunan selalu disempurnakan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis, kebutuhan pembangunan perkebunan terhadap dukungan penelitian dan pengembangan dan perkembangan kapasitas pengelolaan kelembagaan litbang perkebunan.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Puslitbang Perkebunan (Puslitbangbun) berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.140/10/2010 dan yang digunakan dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu berdasarkan ISO 9001 2008 adalah sebagai berikut:



C. Deskripsi Tugas

Deskripsi Tugas Puslitbang Perkebunan terdapat dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan

Tugas :

Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, penelitian dan pengembangan perkebunan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

Fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pemantauan dan evaluasi penelitian dan pengembangan perkebunan;
2. Pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan perkebunan;
3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan perkebunan;
4. Pengelolaan urusan tata usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan.

Visi Puslitbang Perkebunan mengacu kepada Visi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) yaitu:

“Menjadi lembaga penelitian dan pengembangan pertanian terkemuka di dunia dalam mewujudkan system pertanian bioindustri tropika berkelanjutan”

Misi mengacu kepada Misi Balitbangtan yaitu :

- Mewujudkan inovasi pertanian bioindustri tropika unggul berdaya saing berbasis *advanced technology* dan *bioscience, bioengineering*, teknologi responsive terhadap dinamika perubahan iklim, dan aplikasi Teknologi Informasi serta peningkatan *scientific recognition*.
- Mewujudkan *spectrum diseminasi multi channel* (SDMC) untuk mengoptimalkan pemanfaatan inovasi pertanian bioindustri tropika unggul serta peningkatan *impact recognition*.

Program Strategis Perkebunan

Program Strategis Perkebunan Prioritas Penelitian dalam Renstra berdasarkan komoditas:

a. Komoditas Prioritas:

Lada, Jambu mete, Cengkeh, Jahe, Nilam, Temulawak, Kapas, Jarak Pagar, Tembakau, Tebu, Kelapa, Kelapa sawit, Sagu, dan Aren.

b. Komoditas Potensial:

Panili, Pala, dan Kemiri, Lempuyang Wangi, Akar wangi, Serai wangi, Jarak Kepyar, Kenaf, Bunga Matahari, Pinang dan Lontar.

Prioritas penelitian yang akan dilaksanakan oleh Puslitbang Perkebunan adalah meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil melalui kegiatan pemuliaan tanaman dengan perbaikan varietas unggul baru, teknologi budidaya, pengendalian OPT, pasca panen serta pengembangan tanaman perkebunan dan analisis kebijakan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2016 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN menerapkan basis akruaI dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) **Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD .

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan .
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan .

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa

hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	8.400.000,00	8.400.000,00
Pendapatan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00
Jumlah Pendapatan	19.400.000,00	19.400.000,00
Belanja		
Belanja Pegawai	6.451.830.000,00	5.942.380.000,00
Belanja Barang	18.553.462.000,00	16.374.323.000,00
Belanja Modal	10.059.645.000,00	6.127.985.000,00
Jumlah Belanja	35.064.937.000,00	28.444.688.000,00

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp52.040.389,00 atau mencapai 268,25% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp19.400.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2016		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	8.400.000,00	27.797.000,00	330,92
Pendapatan Jasa	11.000.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Iuran dan Denda	0,00	1.674.112,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	0,00	22.569.277,00	0,00
Jumlah	19.400.000,00	52.040.389,00	268,25

Realisasi Pendapatan TA 2016 mengalami penurunan sebesar -34,14% dibandingkan TA 2015. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	.%
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	27.797.000,00	37.181.750,00	-25,24
Pendapatan Jasa	0,00	5.535.000,00	-100,00
Pendapatan luran dan Denda	1.674.112,00	15.719.113,00	-89,35
Pendapatan Lain-lain	22.569.277,00	20.586.055,00	9,63
Jumlah	52.040.389,00	79.021.918,00	-34,14

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2016 adalah sebesar Rp26.336.534.834,00 atau 92,59% dari anggaran belanja sebesar Rp28.444.688.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2016

Uraian	2016		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	5.942.380.000,00	5.941.642.012,00	99,99
Belanja Barang	16.374.323.000,00	15.120.141.981,00	92,34
Belanja Modal	6.127.985.000,00	5.355.890.292,00	87,40
Total Belanja Kotor	28.444.688.000,00	26.417.674.285,00	92,87
Pengembalian Belanja		-81.139.451,00	0,00
Total Belanja	28.444.688.000,00	26.336.534.834,00	92,59

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan kegiatan untuk tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

Uraian	2016			
	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	.%
Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan		28.444.688.000,00	26.417.674.285,00	92,87
Total Belanja Kotor		28.444.688.000,00	26.417.674.285,00	92,87
Pengembalian Belanja			-81.139.451,00	0.00
Total Belanja		28.444.688.000,00	26.336.534.834,00	92,59

Dibandingkan dengan Tahun 2015, Realisasi Belanja TA 2016 mengalami penurunan sebesar -19,82% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain disebabkan karena adanya penurunan belanja pegawai berupa gaji berkala dan kenaikan pangkat dan adanya Pegawai yang Pensiun, adanya Pagu Anggaran yang dilokir serta adanya dana dari Hasil Sisa Lelang dari Belanja Modal

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	.%
Belanja Pegawai	5.902.751.862,00	6.047.402.383,00	-2,39
Belanja Barang	15.077.892.680,00	17.613.072.403,00	-14,39
Belanja Modal	5.355.890.292,00	9.184.217.113,00	-41,68
Total Belanja	26.336.534.834,00	32.844.691.899,00	-19,82

B.2.1 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp5.902.751.862,00 dan Rp6.047.402.383,00. Realisasi belanja TA 2016 mengalami penurunan sebesar -2,39% dari TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya Jumlah Pegawai berkurang karena 2 Orang Pegawai Pensiun, 1 Pegawai Meninggal Dunia dan adanya Jabatan Fungsional Peneliti yang dibebaskan sementara.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.923.674.012,00	5.964.235.175,00	-0,68
Belanja Lembur	17.968.000,00	83.180.000,00	-78,40
Jumlah Belanja Kotor	5.941.642.012,00	6.047.415.175,00	-1,75
Pengembalian Belanja Pegawai	-38.890.150,00	-12.792,00	303.919,31
Jumlah Belanja	5.902.751.862,00	6.047.402.383,00	-2,39

B.2.2 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp15.077.892.680,00 dan Rp17.613.072.403,00. Realisasi belanja barang TA 2016 mengalami penurunan sebesar -14,39% dari TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain adanya Pagu Anggaran Belanja Barang yang dilokir.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.308.555.470,00	1.257.613.585,00	4,05
Belanja Barang Non Operasional	2.755.540.500,00	3.424.796.300,00	-19,54
Belanja Barang Persediaan	4.521.835.625,00	6.009.777.655,00	-24,76
Belanja Jasa	818.961.786,00	1.177.103.923,00	-30,43
Belanja Pemeliharaan	661.989.776,00	681.891.244,00	-2,92
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5.053.258.824,00	5.082.776.496,00	-0,58
Jumlah Belanja Kotor	15.120.141.981,00	17.633.959.203,00	-14,26
Pengembalian Belanja Barang	-42.249.301,00	-20.886.800,00	102,28
Jumlah Belanja	15.077.892.680,00	17.613.072.403,00	-14,39

B.2.3 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.044.423.292,00 dan Rp1.370.062.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016 mengalami penurunan sebesar -23,77% dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh menurunnya Pagu Anggaran untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.044.423.292,00	1.370.062.000,00	-23,77
Jumlah Belanja Kotor	1.044.423.292,00	1.370.062.000,00	-23,77
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1.044.423.292,00	1.370.062.000,00	-23,77

B.2.4 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp4.311.467.000,00 dan Rp6.972.677.555,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2016 mengalami penurunan sebesar -38,17% dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya dana dari Hasil Sisa Lelang dari Belanja Modal

Perbandingan Belanja Modal GEdung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.311.467.000,00	6.973.008.555,00	-38,17
Jumlah Belanja Kotor	4.311.467.000,00	6.973.008.555,00	-38,17
Pengembalian Belanja	0,00	-331.000,00	-100,00
Jumlah Belanja	4.311.467.000,00	6.972.677.555,00	-38,17

B.2.5 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp816.677.558,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2016 mengalami penurunan sebesar -100,00% dibandingkan TA 2015. Hal ini disebabkan karena tidak terdapatnya Pagu Anggaran atau Realisasi untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	816.677.558,00	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	0,00	816.677.558,00	-100,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	0,00	816.677.558,00	-100,00

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET LANCAR

C.1.1 PERSEDIAAN

Saldo Persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.231.500,00 dan Rp3.625.850,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian Persediaan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Barang Konsumsi	3.231.500,00	3.625.850,00
Jumlah	3.231.500,00	3.625.850,00

C.2 ASET TETAP

C.2.1 PERALATAN DAN MESIN

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp20.826.134.477,00 dan Rp20.157.272.475,00.

C.2.2 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp33.442.497.799,00 dan Rp29.708.583.764,00.

C.2.3 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp830.735.408,00 dan Rp1.572.861.408,00.

C.2.4 ASET TETAP LAINNYA

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp88.463.941,00 dan Rp88.463.941,00.

C.2.5 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp-20.094.243.662,00 dan Rp-18.461.780.643,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	20.826.134.477,00	-15.900.265.949,00	4.925.868.528,00
2.	Gedung dan Bangunan	33.442.497.799,00	-3.665.437.503,00	29.777.060.296,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	830.735.408,00	-528.540.210,00	302.195.198,00
4.	Aset Tetap Lainnya	88.463.941,00	0,00	88.463.941,00
Akumulasi Penyusutan		55.187.831.625,00	-20.094.243.662,00	35.093.587.963,00

C.3 ASET LAINNYA

C.3.1 ASET LAIN-LAIN

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp374.546.692,00 dan Rp524.871.022,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.3.2 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp-370.449.123,00 dan Rp-517.633.056,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2016, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lain-lain	374.546.692,00	-370.449.123,00	4.097.569,00
Akumulasi Penyusutan		374.546.692,00	-370.449.123,00	4.097.569,00

C.4 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp41.175.810,00 dan Rp48.428.568,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	41.175.810,00	48.428.568,00
Jumlah	41.175.810,00	48.428.568,00

C.5 EKUITAS

C.5.1 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp35.059.741.222,00 dan Rp33.027.836.193,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp14.837.789,00 dan Rp29.835.863,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Pendapatan Anggaran Lain-lain	12.966.677,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.674.112,00	15.719.113,00	-89,35
Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	5.535.000,00	-100,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	197.000,00	8.581.750,00	-97,70
Jumlah	14.837.789,00	29.835.863,00	-50,27

D.2 BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp5.902.751.862,00 dan Rp5.902.751.862,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Gaji Pokok PNS	4.001.662.500,00	3.870.157.000,00	3,40
Beban Pembulatan Gaji PNS	51.495,00	87.211,00	-40,95
Beban Tunj. Anak PNS	80.527.120,00	80.654.490,00	-0,16
Beban Tunj. Beras PNS	201.327.600,00	214.485.800,00	-6,14
Beban Tunj. Fungsional PNS	539.450.000,00	620.350.000,00	-13,04
Beban Tunj. PPh PNS	91.607.177,00	150.714.912,00	-39,22

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Tunj. Struktural PNS	84.370.000,00	73.190.000,00	15,28
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	293.783.970,00	296.612.970,00	-0,95
Beban Tunjangan Umum PNS	124.690.000,00	136.125.000,00	-8,40
Beban Uang Lembur	17.968.000,00	83.180.000,00	-78,40
Beban Uang Makan PNS	467.314.000,00	521.845.000,00	-10,45
Jumlah	5.902.751.862,00	6.047.402.383,00	-2,39

D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp4.911.377.907,00 dan Rp6.546.838.705,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Persediaan bahan baku	1.871.239.285,00	2.122.663.730,00	-11,85
Beban Persediaan konsumsi	2.667.289.972,00	4.278.761.975,00	-37,66
Beban persediaan lainnya	372.848.650,00	145.413.000,00	156,41
Jumlah	4.911.377.907,00	6.546.838.705,00	-24,98

D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp4.875.804.998,00 dan Rp5.858.877.367,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Bahan	646.879.075,00	447.086.800,00	44,69
Beban Barang Non Operasional Lainnya	339.111.425,00	377.484.500,00	-10,17
Beban Barang Operasional Lainnya	124.040.000,00	120.331.580,00	3,08
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	172.560.000,00	172.560.000,00	0,00
Beban Honor Output Kegiatan	1.769.550.000,00	2.599.757.500,00	-31,93
Beban Jasa Konsultan	15.015.000,00	12.000.000,00	25,13
Beban Jasa Profesi	136.900.000,00	358.350.000,00	-61,80
Beban Keperluan Perkantoran	1.009.738.000,00	962.954.700,00	4,86
Beban Langganan Air	87.876.800,00	68.684.200,00	27,94
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	81.880.000,00	71.874.480,00	13,92
Beban Langganan Listrik	391.938.413,00	495.702.569,00	-20,93
Beban Langganan Telepon	24.354.815,00	30.848.733,00	-21,05
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.217.470,00	1.767.305,00	25,47
Beban Sewa	73.744.000,00	139.475.000,00	-47,13
Jumlah	4.875.804.998,00	5.858.877.367,00	-16,78

D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp272.851.844,00 dan Rp145.715.844,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	104.843.646,00	40.484.344,00	158,97
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.447.395,00	88.830.200,00	-43,21
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	111.310.803,00	16.401.300,00	578,67
Beban Persediaan suku cadang	6.250.000,00	0,00	0,00
Jumlah	272.851.844,00	145.715.844,00	87,25

D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp5.011.009.523,00 dan Rp5.062.357.196,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Perjalanan Biasa	5.011.009.523,00	5.062.357.196,00	-1,01
Jumlah	5.011.009.523,00	5.062.357.196,00	-1,01

D.7 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp3.098.032.122,00 dan Rp3.261.582.536,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	683.133.735,00	588.520.935,00	16,08
Beban Penyusutan Irigasi	3.460.000,00	3.460.000,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	33.584.956,00	44.436.606,00	-24,42
Beban Penyusutan Jaringan	159.900,00	8.911.450,00	-98,21
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	228.005,00	6.599.816,00	-96,55
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.377.465.526,00	2.609.653.729,00	-8,90
Jumlah	3.098.032.122,00	3.261.582.536,00	-5,01

D.8 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015	% Naik / Turun
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-2.942.500,00	0,00	0,00
Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara (Masuk TP/TGR) Bendahara	5.125.000,00	19.703.315,00	-73,99
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	27.600.000,00	28.600.000,00	-3,50
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	4.477.600,00	882.740,00	407,24
Jumlah	34.260.100,00	49.186.055,00	-30,35

E PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp33.027.836.193,00 dan Rp33.027.836.193,00.

E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp-24.022.730.367,00 dan Rp-26.843.752.113,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015.

E.4.1 KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp1.420.854.193,00 dan Rp9.856.270,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.5 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp24.633.771.203,00 dan Rp31.047.943.903,00. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2016.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	26.336.534.834,00
Diterima dari Entitas Lain	-52.040.389,00
Transfer Keluar	-2.771.627.355,00
Transfer Masuk	889.873.350,00
Jumlah	24.633.771.203,00

E.6 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp35.059.741.222,00 dan Rp33.027.836.193,00.

F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

- Rekening yang digunakan dalam pengelolaan anggaran pada Tahun Anggaran 2015 adalah rekening Bendahara Pengeluaran dengan No. Rek 0012.01.000054.30.7 pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Bogor, yang telah disahkan penggunaannya oleh KPPN Bogor sesuai Surat Persetujuan Rekening No. S.0103/WPB.12/KP.04/2008 tanggal 14 Januari 2008. Nomor rekening tersebut digunakan untuk menampung seluruh kegiatan Puslitbang Perkebunan dari APBN.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Dalam pelaksanaan anggaran sampai 30 Juni 2016 Puslitbang Perkebunan telah melakukan 2 kali revisi DIPA. Revisi Pertama tanggal 17 Maret 2016 meliputi pengurangan belanja non operasional sebesar Rp. 1.989.099.000,- dan belanja modal sebesar Rp. 3.931.660.000,- karena adanya program penghematan belanja pemerintah, Revisi Kedua tanggal 21 Juni 2016 berupa Blokir Pagu Anggaran sebesar Rp. 450.000.000,-
- Puslitbang Perkebunan telah melaksanakan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik negara sebanyak 13 (tiga belas) kali, yaitu :
 - 1) Keputusan Menteri Keuangan nomor 39/KM.6/WKN.8/KNL.03/2015 tanggal 1 Mei 2013 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertanian berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 18 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp. 1.296.525.00,-
 - 2) Keputusan Menteri Keuangan nomor 47/KM.06/WKN.08/KNL.03/2013 tanggal 2 Juli 2013 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertanian berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 1 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 297.400.000,-
 - 3) Keputusan Menteri Keuangan nomor 13/KM.6/WKN.8/KNL.03/2014 tanggal 8 April 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertanian berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 48 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 4.153.330.210,-
 - 4) Keputusan Menteri Keuangan nomor 26/KM.6/WKN.8/KNL.03/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertanian berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 51 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 3.295.120.579,-
 - 5) Keputusan Menteri Pertanian nomor 295/Kpts/PL.320/5/2015 tanggal 5 Mei 2015 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Puslitbang Perkebunan berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 1.161 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 3.515.673.840,-
 - 6) Keputusan Menteri Pertanian nomor 669/Kpts/PL.310/11/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Puslitbang Perkebunan berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 785 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 3.567.048.776,-
 - 7) Keputusan Menteri Pertanian nomor 21/Kpts/PL.310/1/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Puslitbang Perkebunan berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 192 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 666.926.946,-
 - 8) Keputusan Menteri Pertanian nomor 324/Kpts/PL.310/5/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Puslitbang Perkebunan berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 321 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 1.039.708.750,-

- 9) Keputusan Menteri Keuangan nomor 81/KM.6/WKN.8/KNL.03/2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertanian berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 7 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 2.697.446.000,-
 - 10) Keputusan Menteri Keuangan nomor 88/KM.6/KN.8/KN.5/2016 tanggal 22 Juni 2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertanian berupa Gedung dan Bangunan sebanyak 1 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 10.419.608.350,-
 - 11) Keputusan Menteri Keuangan nomor 113/KM.6/KN.5/2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertanian berupa Gedung dan Bangunan sebanyak 1 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 5.902.435.534,-
 - 12) Keputusan Menteri Keuangan nomor 100/KM.6/WKN.08/KNL.03/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertanian berupa Gedung dan Bangunan sebanyak 21 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 3.150.547.130,-
 - 13) Keputusan Menteri Pertanian nomor 324/Kpts/PL.310/5/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Puslitbang Perkebunan berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 162 Unit dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 655.587.233,-
- Terdapat Barang Milik Negara yang di Transfer Masuk ke Puslitbang Perkebunan dengan Total Nilai Seluruhnya sebesar Rp 889.873.350,- yang terdiri dari :
 - 2.1. Transfer Masuk dari Balitro berupa Lemari Besi/Metal sebanyak 1 Unit senilai Rp. 3.712.500,-
 - 2.2. Transfer Masuk dari Balitro berupa Kardex Besi sebanyak 1 Unit senilai Rp. 1.280.000,-
 - 2.3. Transfer Masuk dari Balitro berupa Tempat Tidur Besi sebanyak 2 Unit senilai Rp. 2.719.200,-
 - 2.4. Transfer Masuk dari Balitro berupa Lemari Es sebanyak 1 Unit senilai Rp. 8.653.000,-
 - 2.5. Transfer Masuk dari Balitro berupa A.C. Split sebanyak 5 Unit senilai Rp. 24.206.800,-
 - 2.6. Transfer Masuk dari Badan Litbang Pertanian berupa Voice Recorder sebanyak 1 Unit senilai Rp. 776.000,-
 - 2.7. Transfer Masuk dari Badan Litbang Pertanian berupa Camera Digital sebanyak 1 Unit senilai Rp. 5.070.000,-
 - 2.8. Transfer Masuk dari Badan Litbang Pertanian berupa Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia Lainnya sebanyak 4 Unit senilai Rp. 312.807.000,-
 - 2.9. Transfer Masuk dari Badan Litbang Pertanian berupa Lap Top sebanyak 2 Unit senilai Rp. 14.500.000,-
 - 2.10. Transfer Masuk dari Badan Litbang Pertanian berupa Note Book sebanyak 1 Unit senilai Rp. 6.367.000,-
 - 2.11. Transfer Masuk dari Balitro berupa Bangunan Lainnya sebanyak 1 Unit senilai Rp. 509.781.850,-
 - 1. Terdapat Barang Milik Negara Puslitbang Perkebunan yang di **Transfer Keluar** dengan Total Nilai Seluruhnya sebesar Rp. 2.251.494.565,- yang terdiri dari :
 1. Transfer Keluar ke Balittas berupa Kursi Dorong sebanyak 35 Unit senilai Rp. 28.000.000,- dan P.C Unit sebanyak 1 unit senilai Rp. 14.520.000,-,
 2. Transfer Keluar ke Balittas dan Balitro berupa Mini Bus sebanyak 2 Unit dengan total nilai Rp. 271.795.000,-

3. Transfer Keluar ke Balittas berupa Kursi Dorong sebanyak 35 Unit senilai Rp. 28.000.000,- dan P.C Unit sebanyak 1 unit senilai Rp. 14.520.000,-,
4. Transfer Keluar ke Balittas berupa Camera Digital sebanyak 1 Unit senilai Rp 7.131.790,-
5. Transfer Keluar ke Balittri berupa Rak Peralatan (Rak Kultur) sebanyak 11 Unit senilai Rp 137.106.000,-
6. Transfer Keluar ke Balittri berupa Laminar Air Flow Cabinet sebanyak 1 Unit senilai Rp 81.500.000,-
7. Transfer Keluar ke Balittri dan Balittas berupa Note Book sebanyak 2 Unit senilai Rp 22.600.000,-
8. Transfer Keluar ke Balitro berupa Bangunan Lainnya sebanyak 2 unit senilai Rp. 969.695.000,-, dan Taman Lainnya sebanyak 1 unit senilai Rp 183.328.750,-
9. Transfer keluar ke BPTP Sumatera Barat berupa Pagar Permanen sebanyak 1 unit senilai Rp. 313.824.815,- Jalan Lhusus Kompleks sebanyak 1 unit senilai Rp. 217.033.000,- dan Instalasi Air Permukaan Lainnya sebanyak 1 unit senilai Rp. 525.093.000,-
3. Terdapat Barang Milik Negara yang di Reklasifikasi Keluar, yaitu berupa Alat Pendingin Lainnya sebanyak 1 Unit senilai Rp 302.051.892,- dan Bangunan Gedung Laboratorium Permanen sebanyak 2 Unit senilai Rp. 4.285.678.585,-
4. Terdapat Barang Milik Negara yang di Reklasifikasi Masuk, yaitu berupa A.C. Sentral sebanyak 9 Unit senilai Rp. 297.431.892,-, A.C. Split sebanyak 1 Unit senilai Rp. 4.620.000,- Bangunan Gedung Kantor Permanen sebanyak 1 Unit senilai Rp. 667.342.130,- dan Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen sebanyak 1 Unit senilai Rp. 3.618.336.455,-
5. Terdapat Barang Milik Negara Puslitbang Perkebunan yang sudah dihapus dari Daftar Barang Milik Negara sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 11/Kpts/PL.320/1/2016 tanggal 7 Januari 2016, Risalah Lelang dari KPKNL Bogor 1473/2015 tanggal 2 November 2015 dan Berita Acara Serah Terima Pengalihan Status Barang Milik Negara yang telah dijual secara Lelang melalui KPKNL Bogor Nomor 973.1/PL.400/I.4/11/2015 tanggal 3 November 2015.